

**ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI  
POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DI DESA MEKARSARI KECAMATAN PAGAR DEWA  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RIKA NURAI SYAH  
NPM 2113032061**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI DESA MEKARSARI KECAMATAN PAGAR DEWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024**

**Oleh**

**RIKA NURAI SYAH**

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan inklusif di tingkat lokal. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mencerminkan sejauh mana kesadaran politik dan keterlibatan warga negara dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada di Desa Mekarsari, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilih tetap Desa Mekarsari, dengan sampel sebanyak 91 responden yang diambil menggunakan teknik *random sampling* melalui rumus *Slovin*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti sosial ekonomi, psikologis, dan lingkungan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Faktor internal dan eksternal terbukti menjadi unsur penting dalam mendorong keterlibatan politik masyarakat di tingkat desa.

**Kata Kunci: Partisipasi, Politik, Pilkada, Mekarsari**

## ***ABSTRACT***

### ***ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING PUBLIC POLITICAL PARTICIPATION IN LOCAL HEAD ELECTIONS IN MEKARSARI VILLAGE, PAGAR DEWA DISTRICT WEST LAMPUNG REGENCY IN 2024***

***By***

**RIKA NURAI SYAH**

*Political participation is one of the key indicators in achieving healthy and inclusive democracy at the local level. The level of community participation in Local Elections (Pilkada) reflects the extent of political awareness and citizen engagement in determining the direction of local leadership. This study aims to determine the influence of internal and external factors on community political participation in the Pilkada in Mekarsari Village, Pagar Dewa Subdistrict, West Lampung Regency in 2024. The method used is a descriptive method with a quantitative approach. The population in this study is all registered voters in Mekarsari Village, with a sample of 91 respondents selected using random sampling techniques based on the Slovin formula. Data collection techniques were conducted through questionnaires and interviews. The results of the study indicate that factors such as socioeconomic, psychological, and environmental factors have a positive and significant influence on community political participation. These factors are influenced by other factors outside the scope of this study. Internal and external factors have proven to be important elements in encouraging community political involvement at the village level.*

***Keywords: Participation, Politics, Local Elections, Mekarsari***

**ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI  
POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DI DESA MEKARSARI KECAMATAN PAGAR DEWA  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024**

**Oleh**

**RIKA NURAI SYAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DI DESA MEKARSARI  
KECAMATAN PAGAR DEWAKABUPATEN  
LAMPUNG BARAT TAHUN 2024**

Nama Mahasiswa

: **Rika Nuraisyah**

Nomor Pokok Mahasiswa

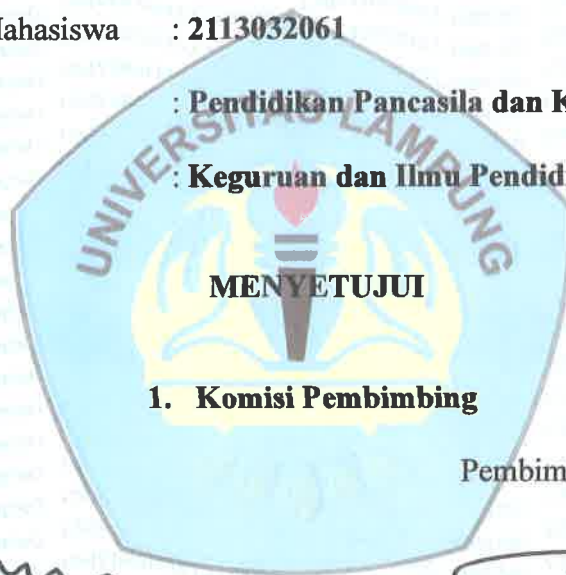
: **2113032061**

Program Studi

: **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Fakultas

: **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**1. Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



**Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**  
NIP 19611214 199303 1 001

Pembimbing II



**Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.**  
NIK 231601840309101

**2. Mengetahui**

Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial



**Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**  
NIP. 19741108 200501 1 003

Koordinator Program Studi  
Pendidikan PKn



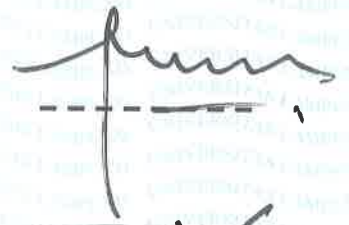
**Dr. Yulisca Nuralisa, M.Pd**  
NIP. 19870602 200812 2 001

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua

: Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



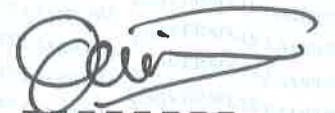
Sekretaris

: Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.



Penguji  
Bukan Pembimbing

: Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.



### 2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.

NIP 19870504 201404 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Agustus 2025



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Rika Nuraisyah  
NPM : 2113032061  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Desa Mekarsari, Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten  
Lampung Barat, Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2025



Rika Nuraisyah  
NPM. 2113032061

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rika Nuraisyah, dilahirkan di Lambar pada tanggal 15 September 2002. Penulis merupakan anak ke empat dari enam bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan Bapak Kumaidi Ismail dan *Almarhumah* Ibu Nurmah.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. SD Negeri 1 Sukamulya yang diselesaikan pada tahun 2014
2. MTS Nurul Iman yang diselesaikan pada tahun 2017
3. MAN 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020

Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis pernah menjadi Anggota Forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA).

Kemudian pada tahun 2024 penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dan melaksanakan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SD Negeri 1 Bali Agung.



## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kupersembahkan karya ini sebagai tanda cinta dan baktiku kepada:*

*“Kedua orang tua hebatku, Bapak Kumaidi Ismail dan Almarhumah Ibu Nurmah yang sangat aku sayangi dan aku cintai. Terima kasih telah merawat dan menjagaku dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tulus, yang selalu mendoakanku sukses di dunia dan juga di akhirat, yang selalu memberikan dukungan, serta jerih payah pengorbanan disetiap tetes keringat demi keberhasilanku. Aku tentu tidak bisa membalas semua yang kalian berikan namun aku selalu berusaha untuk selalu membuat kalian tersenyum bangga memiliki diriku dan tak lupa pula aku selalu memohon kepada Allah SWT. Agar orang tuaku selalu diberikan kesehatan dan umur panjang agar dapat menemani perjalanku untuk membahagiakan mereka kelak”*

*“Serta Almamaterku tercinta Universitas Lampung”*

## **MOTTO**

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya  
bersama kesulitan ada kemudahan”.**

**“(Al-Insyirah: 5-6)”**

## SANWACANA

Puji Syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Mekarsari Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spriritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Plt. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung,
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Dan Keuangan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd., selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., selaku Pembimbing I. Terima Kasih banyak atas saran dan masukannya serta motivasi dan semangat yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing Akademik (PA) dan Pembimbing II. Terima kasih banyak telah membimbing, memberikan motivasi, ilmu, meluangkan waktu dan tenaga dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd., sebagai Pembahas I. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta selalu memberikan motivasi, saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., sebagai Pembahas II. Terimakasih banyak atas saran dan masukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Bapak dan Ibu Dosen program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan, motivasi dan semangat serta bantuan yang juga selalu diberikan.
12. Staf Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama mengadakan penelitian.
13. Kepada Ayah tercinta, Bapak Kumaidi Ismail beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras agar anak-anaknya tidak merasakan apa yang beliau rasakan, terimakasih telah mendidik penulis, memotivasi, memberikan nasehat, wejangan, dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini sampai selesai. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Ayah yang telah mengusahakan semuanya untuk putri kecil tercintanya. Karna doa dan dukungan beliau saya masi hidup, dan berjuang untuk menggapai apa yang saya cita citakan.
14. *Almarhumah* ibu Nurmah seseorang yang biasa saya panggil mama, seseorang yang sangat kusayangi, kucintai, dan yang paling berarti dihidupku. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan mama ditempat yang paling mulia di sisi Allah SWT. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan

saya sampai tempat ini walaupun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa ibu temani lagi.

15. Saudara kandung Penulis, yaitu Agus Ismail, Ita Fitriana, Linda Nurfatimah, Iqlima Hanum, dan Irfan Ismail. Terimakasih banyak atas dukungan secara moril maupun materil, terimakasih atas segala dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Dan tak lupa kepada ketiga keponakan saya tercinta Jasmine Abidah, Mikala Muhammad Jabir, dan si *imoetku* Kairo Bening Muhammad Irsyad. Terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat dan membuat penulis senang, sehingga membuat penulis semangat untuk mengerjakannya sampai selesai.
16. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Dzikrillah Akmal Huda, S.P. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup Penulis. berkontribusi banyak selama perkuliahan saya, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping segala hal yang menemani ataupun menghibur dalam kesedihan sehingga penulis merasa aman, nyaman, dan tentram. Semoga Allah memberikan kelancaran bagimu dalam segala niat baik Aamiin.
17. Sahabatku, Nandha Ardhia Putri dan Amalia Salsabila yang telah kebersamai penulis sejak bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). terimakasih atas dukungan, motivasi, semangat serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Semangat mengejar cita-cita kita bersama.
18. Sahabatku, Maharani Permata Ferry terima kasih telah menjadi sahabat penulis sejak Maba hingga sampai selesai menyelesaikan studi pada perkuliahan ini. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Jenissa Triayu Danial dan Yeni Yusnita yang telah menemani penulis disaat penulis bimbingan dan motivasi serta bantuan yang diberikan kepada penulis.
19. Sahabat KKN Penulis, Fini Adelia, Farida Julina, dan Intar Khoerunisa terimakasih telah menjadi sahabat penulis pada saat KKN terimakasih selalu memberikan penulis kebahagiaan pada saat KKN kita bercanda bahagia berama sama serta terimakasih atas motivasi yang diberikan kepada penulis.

20. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri. Rika Nuraisyah, Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Terimakasih tidak menyerah disaat jalan didepan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan. Terimakasih karna tetap memilih melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terimakasih karna telah jujur kepada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karna keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut tetap melekat erat, dan paling penting, terimakasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Mekarsari Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan dimasa mendatang serta semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Bandar Lampung, 22 Agustus 2025**

**Penulis**

**Rika Nur Aisyah**

**NPM. 2113032061**



## DAFTAR ISI

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                          | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                         | <b>v</b>  |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                                        | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                            | 1         |
| B. Identifikasi Masalah.....                                       | 4         |
| C. Batasan Masalah .....                                           | 5         |
| D. Rumusan Masalah.....                                            | 5         |
| E. Tujuan Penelitian .....                                         | 5         |
| F. Manfaat Penelitian .....                                        | 5         |
| 1. Manfaat Teoritis .....                                          | 5         |
| 2. Manfaat Praktis .....                                           | 6         |
| G. Ruang Lingkup Penelitian.....                                   | 7         |
| 1. Ruang Lingkup Ilmu .....                                        | 7         |
| 2. Ruang Lingkup Objek Penelitian .....                            | 7         |
| 3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian.....                            | 7         |
| 4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian .....                           | 8         |
| 5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian.....                             | 8         |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                  | <b>9</b>  |
| A. Tinjauan Pustaka .....                                          | 9         |
| 1. Pemilihan Kepala Daerah.....                                    | 9         |
| 2. Syarat-syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..... | 11        |
| 3. Pelaksanaan Pilkada .....                                       | 12        |
| 4. Sejarah Singkat Pilkada.....                                    | 13        |
| 5. Manfaat/Fungsi Pilkada.....                                     | 15        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 6. Budaya Politik di Indonesia .....                          | 15        |
| 7. Politik .....                                              | 17        |
| 8. Partisipasi Politik.....                                   | 19        |
| 9. Tipologi Partisipasi Politik.....                          | 21        |
| 10. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik ..... | 22        |
| 11. Perilaku Memilih.....                                     | 26        |
| B. Kajian Penelitian Relevan.....                             | 30        |
| C. Kerangka Pikir Penelitian .....                            | 32        |
| D. Hipotesis .....                                            | 35        |
| <b>III. METODE PENELITIAN .....</b>                           | <b>36</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                                      | 36        |
| B. Populasi dan Sampel.....                                   | 37        |
| 1. Populasi .....                                             | 37        |
| 2. Sampel.....                                                | 37        |
| C. Variabel Penelitian .....                                  | 38        |
| D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional .....         | 38        |
| 1. Definisi Konseptual.....                                   | 38        |
| 2. Definisi Operasional.....                                  | 40        |
| E. Teknik Pengambilan Data .....                              | 42        |
| F. Uji Validitas dan Reliabilitas .....                       | 44        |
| 1. Uji Validitas.....                                         | 44        |
| 2. Uji Reliabilitas.....                                      | 44        |
| G. Teknik Analisis Data .....                                 | 46        |
| <b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>              | <b>48</b> |
| A. Langkah-Langkah Penelitian .....                           | 48        |
| 1. Persiapan Pengajuan Judul .....                            | 48        |
| 2. Penelitian Pendahuluan .....                               | 48        |
| 3. Pengajuan Rencana Penelitian .....                         | 49        |
| 4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data .....                     | 49        |
| 5. Pelaksanaan Uji Coba Penelitian.....                       | 50        |
| B. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....                  | 54        |
| 1. Sejarah Singkat Pekon Mekarsari .....                      | 54        |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 2. Lokasi Pekon Mekarsari.....              | 55         |
| 3. Keadaan Penduduk.....                    | 56         |
| 4. Visi dan Misi Pekon .....                | 57         |
| C. Deskripsi Data Penelitian.....           | 57         |
| 1. Pengumpulan Data .....                   | 57         |
| 2. Penyajian Data.....                      | 58         |
| 3. Penyajian Data Indikator .....           | 59         |
| D. Pembahasan Hasil Penelitian .....        | 82         |
| 1. Faktor Sosial Ekonomi .....              | 82         |
| 2. Faktor Psikologis.....                   | 86         |
| 3. Faktor Lingkungan .....                  | 89         |
| 4. Partisipasi dalam Pemungutan Suara ..... | 92         |
| 5. Partisipasi Dalam Kampanye .....         | 95         |
| 6. Partisipasi Dalam Pengawasan.....        | 100        |
| <b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>        | <b>107</b> |
| A. Kesimpulan .....                         | 107        |
| B. Saran .....                              | 108        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                  | <b>109</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                        | <b>113</b> |

## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b>                                                            | <b>Halaman</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel 1. Operasional Variabel dalam Indikator .....                     | 42             |
| Tabel 2. Koefisien Reliabilitas .....                                   | 45             |
| Tabel 3. Hasil Uji Coba Validitas Variabel X Angket Kepada 13 .....     | 51             |
| Tabel 4. Hasil Uji Coba Validitas Variabel Y Angket Kepada 13 .....     | 51             |
| Tabel 5. Uji Reliabilitas Variabel (X) Kepada 13 Responden diluar ..... | 53             |
| Tabel 6. Uji Reliabilitas Variabel (Y) Kepada 13 Responden diluar ..... | 53             |
| Tabel 7. Distribusi Frekuensi Indikator Tingkat Pendidikan .....        | 60             |
| Tabel 8. Distribusi Frekuensi Indikator Status Pekerjaan .....          | 62             |
| Tabel 9. Distribusi Frekuensi Indikator Kesadaran Politik .....         | 64             |
| Tabel 10. Distribusi Frekuensi Indikator Sikap dan Kepercayaan .....    | 65             |
| Tabel 11. Distribusi Frekuensi Indikator Pengaruh Keluarga .....        | 67             |
| Tabel 12. Distribusi Frekuensi Indikator Pengaruh Lingkungan .....      | 68             |
| Tabel 13. Distribusi Frekuensi Indikator Akses Terhadap Informasi ..... | 70             |
| Tabel 14. Distribusi Frekuensi Indikator Kehadiran di TPS .....         | 72             |
| Tabel 15. Distribusi Frekuensi Indikator Kesadaran Mencoblos .....      | 73             |
| Tabel 16. Distribusi Frekuensi Indikator Kehadiran Dalam .....          | 75             |
| Tabel 17. Distribusi Frekuensi Indikator Keterlibatan Dalam Tim .....   | 76             |
| Tabel 18. Distribusi Frekuensi Indikator Menyebarkan Informasi .....    | 78             |
| Tabel 19. Distribusi Frekuensi Indikator Pengawasan Pemilu .....        | 80             |
| Tabel 20. Distribusi Frekuensi Indikator Pelaporan Pelanggaran .....    | 81             |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                      | Halaman |
|-----------------------------|---------|
| 1. Kerangka Pemikiran ..... | 35      |

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat telah menjadi pilihan utama dalam penyelenggaraan negara modern. Di Indonesia, implementasi demokrasi tercermin melalui berbagai mekanisme pemilihan langsung, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan manifestasi dari desentralisasi dan otonomi daerah pasca reformasi. Pilkada langsung yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 menjadi tonggak penting dalam perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat lokal (Prihatmoko, 2005).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu tonggak penting dalam mempresentasikan kedaulatan dan suara rakyat untuk mewujudkan negara yang Demokrasi. Pemilu merupakan gerbang utama untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Pemilu adalah praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*Representative Government*). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 23 Tahun 2014, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat (Aspinal & Mietzner, 2010). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan memperkuat legitimasi pemerintahan daerah. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), budaya politik yang kompleks ini memainkan peran penting dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat yang aktif

terlibat dalam politik, sementara di sisi lain, masih ada kelompok yang cenderung pasif atau bahkan apatis terhadap politik (Mujani & Liddle, 2009). Faktor-faktor seperti patronase politik, loyalitas terhadap figur tertentu, serta pengaruh elite lokal juga turut membentuk pola perilaku politik masyarakat (Aspinall & Mietzner, 2010). Selain itu, politik uang masih menjadi permasalahan yang signifikan dalam setiap kontestasi politik. Praktik ini sering digunakan oleh kandidat untuk menarik dukungan dengan cara memberikan insentif materi kepada pemilih (Hadiz, 2017). Politik uang bukan hanya menggerus nilai demokrasi, tetapi juga menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap elite politik tanpa mempertimbangkan kualitas kandidat yang dipilih.

Negara yang melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya sudah baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau bahkan tidak mampu melaksanakan pemilu dengan baik, ditandai dengan terjadinya berbagai kecurangan dan diskriminasi, maka negara tersebut dinilai sebagai negara yang anti demokrasi. Implementasi demokrasi di Indonesia salah satunya diwujudkan dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Febriadi, 2018). Salah satu bentuk Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu yakni ikut serta dalam pemberian suara atas dipilihnya secara langsung anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota (Salim, 2014).

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan elemen krusial yang menentukan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Tingkat partisipasi masyarakat tidak hanya mencerminkan legitimasi hasil pemilihan, tetapi juga menggambarkan kesadaran politik dan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Namun demikian, fenomena golongan putih (golput) dan rendahnya angka partisipasi di berbagai daerah masih menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan Pilkada (Mujani, 2007).

Provinsi Lampung, dengan jumlah penduduk mencapai 9.176.744 jiwa (BPS Lampung, 2023), memiliki kompleksitas tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada. Pada Pilkada serentak tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Lampung mencapai 69,8%, lebih rendah dari target nasional KPU sebesar 77,5%. Provinsi ini terdiri dari 15 kabupaten/kota dengan karakteristik sosial-budaya yang beragam. (KPU Provinsi Lampung, 2020).

Kabupaten Lampung Barat, yang terletak di bagian barat Provinsi Lampung, memiliki luas wilayah 3.368,14 km<sup>2</sup> dengan populasi sekitar 300.000 jiwa (BPS Lampung Barat, 2023). Daerah ini dikenal dengan topografi pegunungan dan perbukitan, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, terutama kopi. Karakteristik ini mempengaruhi dinamika sosial politik masyarakat setempat, termasuk dalam hal partisipasi politik.

Kabupaten Lampung Barat, sebagai salah satu dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, memiliki populasi sebesar 305.989 jiwa yang tersebar di 25 kecamatan (BPS Lampung Barat, 2023). Pada Pilkada 2019, tingkat partisipasi pemilih di kabupaten ini mencapai 71,2%, dengan variasi yang signifikan antar kecamatan. Khususnya di Kecamatan Pagar Dewa, yang memiliki 11 desa dengan total penduduk 15.478 jiwa, tingkat partisipasi pemilih mencapai 68,5% (KPU Kabupaten Lampung Barat, 2019). Kabupaten Lampung Barat tepatnya pada tanggal 27 November 2024 lalu. Peserta Pilkada tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat hanya terdiri dari 1 pasangan calon, yaitu pasangan H. Parosil Mabsus, S.Pd dan Drs. H. Mad Hasnurin serta melawan dari pasangan Kotak kosong.

Partisipasi Masyarakat di Desa Mekarsari dalam Pilkada 2024 menarik untuk diteliti karena beberapa alasan. Pertama, fenomena ini bertentangan dengan tren umum di banyak daerah di Indonesia di mana tingkat partisipasi cenderung menurun atau stagnan (Randi, 2021). Kedua, sebagai daerah yang relatif terpencil, Desa Mekarsari seharusnya menghadapi tantangan dalam hal akses informasi dan mobilisasi pemilih, namun harusnya menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi.



Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi partisipasi ini perlu diteliti lebih lanjut. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kesadaran politik, dan kehadiran tokoh lokal yang kharismatik dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilihan (Aspinall dan Mietzner, 2010). Faktor sosial ekonomi, seperti tingkat kesejahteraan dan akses terhadap sumber daya, juga berperan penting dalam menentukan tingkat partisipasi politik masyarakat (Mujani *et al.*, 2012).

Efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU dan lembaga terkait juga mungkin berkontribusi pada partisipasi. Strategi sosialisasi yang tepat sasaran dan melibatkan tokoh lokal dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi pada Pilkada (Suryadi dan Karim, 2018). Konteks di Lampung Barat, faktor geografis dan infrastruktur juga perlu dipertimbangkan. Akses terhadap TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan kemudahan dalam proses pemilihan dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi (Haryanto, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Mekarsari dalam Pilkada 2024. Memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan strategi peningkatan partisipasi politik di daerah lain, terutama di wilayah dengan karakteristik serupa.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat permasalahan yang diidentifikasi, sebagai berikut.

1. Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024.
2. Pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa Mekarsari dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka batasan masalah penelitian ini adalah Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Mekarsari Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Analisis Faktor - faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Mekarsari Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui Faktor - faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Mekarsari Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

### **F. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori-teori ilmu politik, khususnya dalam bidang partisipasi politik dan perilaku pemilih. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur akademik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.
- b. Pemahaman Kontekstual: Studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika partisipasi politik di tingkat desa, khususnya dalam konteks Desa Mekarsari, Kecamatan Pagar Dewa,

Kabupaten Lampung Barat. Hal ini dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di daerah lain.

- c. Pengujian dan Pengembangan Model: Penelitian ini dapat digunakan untuk menguji dan mengembangkan model-model partisipasi politik yang sudah ada, serta potensial menciptakan model baru yang lebih sesuai dengan konteks lokal Indonesia.
- d. Basis Data Ilmiah: Hasil penelitian ini dapat menjadi basis data ilmiah yang berharga bagi para akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam memahami pola partisipasi masyarakat dalam Pilkada di daerah pedesaan.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Daerah:
  - Memberikan informasi penting untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.
  - Membantu dalam merancang program-program edukasi politik yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.
- b. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU):
  - Menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih.
  - Membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat partisipasi dalam Pilkada mendatang.
- c. Bagi Masyarakat Desa Mekarsari:
  - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada.
  - Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi mereka, sehingga dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dan kritis.

d. Bagi Calon Kepala Daerah:

- Menyediakan informasi berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yang dapat digunakan untuk merancang strategi kampanye yang lebih efektif.
- Membantu dalam memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa dalam konteks politik lokal.

e. Bagi Organisasi Masyarakat Sipil:

- Memberikan landasan untuk merancang program-program pemberdayaan politik masyarakat yang lebih terarah.
- Membantu dalam advokasi kebijakan terkait partisipasi politik di tingkat desa.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut:

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup Ilmu Sosial, khususnya dalam kajian Partisipasi Masyarakat dan Politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, dengan fokus pada Desa Mekarsari, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat.

### **2. Ruang Lingkup Objek Penelitian**

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Desa Mekarsari, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat.

### **3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian**

Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di Desa Mekarsari, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat, yang akan diambil dari berbagai kalangan usia dan latar belakang sosial.

#### **4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat, yang merupakan lokasi pemilihan kepala daerah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

#### **5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor **8883/UN26.13/PN.01.00/2024** pada tanggal 20 September 2024.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala Daerah adalah suatu pemilihan kepala pemerintahan tingkat wilayah di Kabupaten/Provinsi oleh masyarakat sebagai sarana dalam menyalurkan aspirasi demi perubahan pada suatu daerah demi kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai pemilih sangat penting keikutsertaannya dalam mensukseskan penyelenggaraan pilkada sebagai wujud negara yang demokratis. Dalam sistem demokrasi, Pemilu di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan secara prosedural (Ginting, 2018).

Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: “Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”

Pemilihan Kepala daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh- tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/wakil gubernur, maupun Bupati/Wakil Bupati atau walikota/wakil walikota (Prihatmoko, 2005). Pilkada merupakan bagian

dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *check and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, *legitimate*, dan peka terhadap kepentingan masyarakat (Yusdianto dan Sa'ban, 2019). Pilkada merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh- tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang nilainya *equivalen* dengan pemilihan anggota DPRD. Peran fungsi pengawasan DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mengetahui tujuan dalam penyelenggaraan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penjelasan mengenai fungsi pengawasan DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan. (Roy, Pitoewas, & Yanzi, 2013).

Pemilihan Kepala Daerah diartikan sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala (Rahmatunnisa, 2017). Setiap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah penyelenggaranya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana tercantum di dalam Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab IV bagian kedelapan pasal 57 (1,2) yang berbunyi : “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di atur dalam undang–undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 24 ayat (5) yang berbunyi “kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.

Pilkada merupakan sebagian kecil dari pelaksanaan sekaligus proses demokrasi di area lokal, karena mekanisme ini hanya memberi ruang

partisipasi yang amat terbatas dalam proses demokrasi pada aspek pemberian suara semata. Sementara aspek demokrasi yang lebih luas terdapat pada skop politik keseharian (*days to days politics*) justru yang berlangsung setelah Pilkada itu berlangsung sehingga datang pemilihan selanjutnya (Agustino, 2014).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan negara yang demokratis. Pilkada berupa partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya untuk memilih seorang pemimpin, pilkada yang baik dilakukan secara demokratis berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## **2. Syarat-syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Berdasarkan Pasal 58 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. Pendidikan terakhir minimal SMA/Sederajat;
4. Usia minimal 30 tahun;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah terjerat kasus hukum (di Penjara);
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat daerah yang bersangkutan;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan;



10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
12. Memiliki nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak
13. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain, riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.
14. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
15. Tidak dalam status pejabat Kepala Daerah.

### **3. Pelaksanaan Pilkada**

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Tujuan utama pilkada adalah rakyat dapat menentukan sendiri pemimpinnya yang dianggap mampu membawa perubahan dan kebaikan terhadap seluruh masyarakat pada daerah tersebut (Alemika, 2016). Suatu pemilu yang demokratis adalah yang memenuhi tiga prasyarat demokrasi diantaranya: 1) adanya kompetisi memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan; 2) adanya partisipasi masyarakat; 3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam pilkada merupakan sesuatu yg krusial oleh karena itu partisipasi warga negara harus ada meskipun keterlibatannya banyak berhenti pada proses

pemilihan (Marijan dan Sutrisno, 2017). Pemilihan yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Memilih antara tawaran kebijakan yang berbeda dan partai atau kandidat yang saling bersaing;
- b. Meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih untuk tindakan yang mereka lakukan ; dan
- c. Mentransformasikan konsepsi simbolik (kedaulatan rakyat) dalam tindakan riil yg sesungguhnya.

Proses pelaksanaan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di atur dalam undang –undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 65 dan 66, di mana dalam pasal 65 ayat (4) dikemukakan bahwa masa persiapan pilkada diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan pilkada meliputi:

1. Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
2. Pendaftaran calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
3. Penetapan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
4. Kampanye;
5. Masa tenang;
6. Pemungutan suara;
7. Penghitungan suara;
8. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

#### **4. Sejarah Singkat Pilkada**

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

adalah bagian dari rezim Otonomi Daerah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sejak berlakunya undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Namun, dalam perjalanannya kemudian, penggunaan kata “Pilkada” tenggelam seiring munculnya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Di mana pemilihan kepala daerah tidak lagi masuk ke dalam rezim otonomi daerah melainkan bagian dari rezim pemilu. Jadi, istilah Pilkada berganti baju menjadi Pemilukada.

Istilah Pemilukada pertama kali digunakan pada perhelatan politik Pemilukada di DKI Jakarta pada 2007 silam. Itulah sebabnya penyelesaian sengketa kedua rezim itu berbeda. Kalau Pilkada sengketanya diselesaikan di Mahkamah Agung (MA), maka di rezim Pemilukada sengketanya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada tahun 2011, terbit Undang-Undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, di dalam undang –undang ini istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Secara eksplisit jelas bahwa pada UU Nomor 22 Tahun 2007, istilah Pemilukada adalah istilah yang tepat digunakan dalam rentang waktu 2007 hingga 2011 karena dalam ayat tadi secara umum menyebutkan Kepala Daerah, sementara dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 juga secara gamblang dan lebih spesifik menyebutkan jabatan kepala daerah, yakni Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Olehnya itu, saat ini (2012 – sekarang) istilah yang tepat kita gunakan adalah Pilgub, bukan lagi Pemilukada. KPU telah menyebut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pilgub. Pun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilkot). Setali tiga uang

dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian disingkat Pilpres.

## 5. Manfaat/Fungsi Pilkada

Menurut Agustino (2014) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berfungsi untuk, Pertama, terwujudnya legitimasi politik pimpinan daerah. Hal ini karena kepala daerah yang dipilih mendapatkan mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung langsung oleh suara pemilih yang nyata (*real voters*). Pemberian suara dalam pemilu merupakan mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat. Kedua, Pilkada langsung mampu membangun serta mewujudkan *local accountability*. Ketika seorang kandidat terpilih sebagai kepala daerah, maka mereka akan meningkatkan kualitas akuntabilitasnya. Ketiga, optimalisasi *equilibrium checks and balances* antara lembaga-lembaga negara dapat berujung pada pemberdayaan masyarakat lokal. Keempat, pilkada langsung akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat terutama yang berkaitan dengan kualitas partisipasi publik. Kelima, Pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat dan Keenam, Pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik.

## 6. Budaya Politik di Indonesia

Budaya politik merupakan salah satu aspek penting dalam memahami pola partisipasi politik masyarakat. Almond dan Verba (1963) membagi budaya politik menjadi tiga tipe utama, yaitu budaya politik parokial, subjek, dan partisipan. Dalam konteks Indonesia, ketiga tipe budaya politik ini dapat ditemukan secara bersamaan dalam masyarakat.

1. Budaya Politik Parokial: Masyarakat dengan budaya politik ini cenderung tidak memiliki kesadaran atau keterlibatan dalam proses

politik. Mereka lebih banyak berorientasi pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka tanpa banyak berpartisipasi dalam politik.

2. Budaya Politik Paternal: Masyarakat dalam kategori ini memiliki kesadaran akan sistem politik, tetapi keterlibatan mereka cenderung pasif. Mereka mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun tidak banyak terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
3. Budaya Politik Partisipan: Dalam budaya politik ini, masyarakat memiliki kesadaran tinggi terhadap hak dan kewajiban politik mereka. Mereka aktif dalam proses politik, termasuk dalam pemilu dan aktivitas demokrasi lainnya.

Dalam konteks Pilkada di Indonesia, faktor-faktor seperti loyalitas politik, pengaruh elite lokal, serta praktik politik uang sering kali mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat (Aspinall & Sukmajati, 2016). Politik uang, yang sering kali terjadi dalam bentuk pemberian uang tunai, sembako, atau insentif lainnya, telah menjadi tantangan besar dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil (Mietzner, 2020). Selain itu, media sosial dan perkembangan teknologi informasi juga turut membentuk pola budaya politik baru di kalangan masyarakat, terutama generasi muda (Nugroho, 2012). Di era digital, kampanye politik semakin bergeser ke media sosial, yang dapat digunakan baik sebagai alat edukasi politik maupun sebagai sarana penyebaran disinformasi dan hoaks (Tapsell, 2018).

Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, budaya politik yang berkembang di suatu daerah dapat berdampak langsung pada partisipasi pemilih dalam Pilkada. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang budaya politik lokal sangat penting dalam merancang strategi peningkatan partisipasi politik yang lebih efektif dan berkelanjutan, dengan menekan praktik politik uang dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemilu.

## 7. Politik

Soekarno mengembangkan konsep Demokrasi Terpimpin, di mana demokrasi harus dipandu oleh seorang pemimpin yang kuat agar tidak terjebak dalam liberalisme ala Barat. Menurutnya, sistem demokrasi yang terlalu bebas justru akan memicu perpecahan di tengah masyarakat yang masih mencari stabilitas setelah merdeka. Oleh karena itu, Demokrasi Terpimpin menekankan pentingnya persatuan nasional, musyawarah mufakat, dan peran besar seorang pemimpin dalam mengarahkan negara (Soekarno, 1959). Namun, dalam praktiknya, konsep ini membuat kekuasaan lebih terpusat pada presiden dan mengurangi peran oposisi dalam politik (Feith, 1962).

Di sisi lain, Mohammad Hatta mengembangkan gagasan tentang demokrasi ekonomi, yang menekankan bahwa sistem politik harus berorientasi pada kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Hatta percaya bahwa tanpa distribusi ekonomi yang adil, demokrasi tidak akan berjalan efektif (Hatta, 1957). Selain itu, ia juga memperjuangkan konsep kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara harus berada di tangan rakyat, bukan hanya dikuasai oleh segelintir elite politik atau kelompok tertentu. Pemikirannya ini sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pentingnya koperasi dan peran negara dalam mengatur ekonomi demi kesejahteraan bersama (Hatta, 1970).

Dalam pandangan Miriam Budiardjo, politik dapat dipahami sebagai usaha untuk mencapai, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan. Ia menyoroti bahwa sistem politik Indonesia berlandaskan Demokrasi Pancasila, yang menyesuaikan prinsip demokrasi dengan nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah dan gotong royong (Budiardjo, 2008). Menurutnya, sistem politik Indonesia telah mengalami berbagai transisi, dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi pasca-Reformasi, yang semakin membuka ruang bagi partisipasi rakyat (Budiardjo, 2009).

Sementara itu, Affan Gaffar melihat bahwa politik Indonesia lebih mengutamakan konsensus dan musyawarah dibandingkan dengan konfrontasi seperti yang terjadi dalam sistem politik negara-negara Barat (Gaffar, 1992). Ia menyoroti bahwa sistem politik di Indonesia bersifat akomodatif, di mana berbagai kelompok kepentingan berusaha mencari titik temu dalam pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam budaya politik yang lebih mengutamakan negosiasi dibandingkan dengan persaingan yang tajam (Gaffar, 2000).

Mochtar Mas'ood (1989) menyoroti bagaimana distribusi kekuasaan di Indonesia sering kali tidak merata, dengan kelompok elite yang mendominasi politik dan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa negara sering kali dijadikan alat oleh kelompok tertentu untuk mempertahankan kepentingan mereka, terutama dalam sistem politik yang masih dipengaruhi oleh patronasi dan oligarki (Mas'ood, 1994). Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan dan kebijakan publik yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan rakyat secara keseluruhan.

Dalam menganalisis pola kepemimpinan di Indonesia, Herbert Feith membagi dua tipe pemimpin utama yang muncul dalam sejarah politik negara ini. Pertama, tipe administrator atau pemimpin yang berbasis pada rasionalitas dan aturan hukum, seperti Mohammad Hatta dan teknokrat Orde Baru, yang mengutamakan efisiensi dan stabilitas pemerintahan (Feith, 1962). Kedua, tipe solidaritas *maker* atau pemimpin yang mengandalkan kharisma dan dukungan massa, seperti Soekarno, yang memanfaatkan daya tarik pribadi dan simbol nasionalisme untuk menggerakkan rakyat (Feith, 1963). Menurut Feith, ketegangan antara kedua tipe kepemimpinan ini sering kali menjadi faktor utama dalam perubahan politik di Indonesia.

Daniel Lev mengkritik bagaimana hukum di Indonesia sering kali digunakan sebagai alat politik oleh kelompok berkuasa. Ia berpendapat bahwa sistem hukum di Indonesia tidak sepenuhnya independen dan masih

dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi (Lev, 1978). Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan serta ketidakmampuan hukum dalam mengontrol penyalahgunaan kekuasaan oleh elite politik (Lev, 1985).

Robison dan Hadiz (2005) mengembangkan konsep kapitalisme oligarki, yang menjelaskan bagaimana politik Indonesia setelah Reformasi masih didominasi oleh elite bisnis dan politik yang memiliki kendali atas sumber daya ekonomi dan kebijakan negara. Mereka berpendapat bahwa meskipun Indonesia telah beralih ke sistem demokrasi, kekuasaan tetap terkonsentrasi di tangan segelintir orang yang menguasai partai politik dan lembaga pemerintahan (Robison & Hadiz, 2005).

## **8. Partisipasi Politik**

### **a. Partisipasi**

Partisipasi merupakan salah satu prinsip mendasar dari sistem *Good Governance*. Partisipasi juga merupakan salah satu aspek penting dalam negara demokrasi. Partisipasi merupakan sebuah bagian dari proses politik dalam upaya menentukan keputusan dan kebijakan negara untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”.

Dalam bahasa inggris, *partisipate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi menurut Suharno (dalam Masa, 2021) partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara.

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

merupakan perilaku turut serta berperan dalam suatu kegiatan.

Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian



saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi menurut Soerjono Soekanto adalah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu.

Partisipasi juga memiliki pengertian *“a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them”* (Narayan, 2014), artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Partisipasi dapat bersifat individual atau kelompok, bisa terjadi secara spontan ataupun secara terorganisir, dapat terjadi disertai dengan kekerasan ataupun secara damai. Partisipasi identik dengan kegiatan politik masyarakat yang dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan politik yaitu dengan cara memberikan dukungan hak suara dalam proses politik. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri. (Kukuh, Yunisca, dan Siswanto, 2023)

Huntington membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.

4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, *monitoring* proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Menurut Conyers (1994), terdapat tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan secara langsung maupun tidak langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi juga merupakan hak demokrasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kebijakan pemerintah yang menyejahterakan.

## 9. Tipologi Partisipasi Politik

Ramlan Surbakti mengelompokkan partisipasi politik menjadi dua yaitu:

- a. Partisipasi Aktif, merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output* dan *input* politik. Partisipasi aktif meliputi mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan.

- b. alternatif kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin dalam sistem pemerintahan.
- c. Partisipasi Pasif, merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output*. Kegiatan yang meliputi Partisipasi Pasif adalah menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Menurut Gabriel Almond (2010) Partisipasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif konvensional dan partisipasi kolektif non konvensional. Bentuk partisipasi kolektif yang konvensional adalah berupa pemberian suara/voting, aktivitas diskusi politik, kegiatan kampanye, aktivitas membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan lain, dan komunikasi individu dengan pejabat politik atau administratif. Sedangkan bentuk partisipasi kolektif non konvensional meliputi pengajuan petisi, berdemonstrasi, Konfrontasi dan mogok.

Cholisin (2009) membedakan Partisipasi politik menjadi empat kategori yaitu: Partisipasi Politik Aktif, Partisipasi politik pasif tertekan (Apatis), Partisipasi politik militan radikal, dan Partisipasi politik pasif. Partisipasi Politik aktif adalah apabila oknum mempunyai kepekaan politik dan meyakinkan terhadap pemerintah atas. Sebaliknya apabila kepekaan politik dan keyakinan pemerintah kurang maka keterlibatan politiknya cenderung pasif tertekan (apatis). Keterlibatan militan radikal ada apabila kepekaan politik atas tetapi keyakinan kepada pemerintah sangat kurang, namun apabila kepekaan politik sangat kurang tetapi keyakinan kepada pemerintah sangat banyak maka keterlibatan ini dikatakan tidak aktif (pasif).

#### **10. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh

manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Ramlan Surbakti membagi lima faktor yang dianggap mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik, sebagai berikut (Surbakti, 2010):

1. Kesadaran Politik, yaitu Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.
2. Kepercayaan Terhadap pemerintah, ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan. Jaringan sosial memungkinkan untuk terhubung dan menjalin hubungan yang baik, hal ini terjadi karena adanya komunikasi yang baik menggunakan prinsip norma-norma dalam etika komunikasi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang budaya, pandangan, dan pengalaman, mempromosikan komunikasi yang lebih inklusif dan menghormati perbedaan. (Diah Puspita Ningrum, Berchah Pitoewas, dan Devi Sutrisno Putri, 2024)
3. Status Sosial dan Status Ekonomi, Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan, atau dengan kata lain status sosial adalah suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya (otomatis) melalui usaha ataupun karena pemberian Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. atau dengan kata status sosial adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, gambaran itu seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan sebagainya. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.
4. Afiliasi Politik Orang tua, Afiliasi berarti tergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai

keanggotaan atau kerja sama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktivitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik. Afiliasi Politik Orang Tua menjadi faktor pertimbangan dalam partisipasi politik, dimana terdapat kesejajaran hubungan antara pekerjaan orang tua dengan pilihan anak. Menurut Soekanto menjelaskan bahwa bimbingan dari para orang tua dibutuhkan oleh para remaja dalam rangka meraih impiannya (dalam Mukhti Arif).

5. Pengalaman Organisasi, Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan. Pengalaman organisasi merupakan satu faktor penunjang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, hal ini berkaitan dengan kehidupan seseorang yang pernah terlibat dalam setiap kegiatan organisasi sosial maupun politik, sehingga orang tersebut memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat lainnya yang tidak pernah merasakan organisasi.

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif, sebaliknya, kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung pasif. Kedua faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

Menurut Damsar dalam buku Sistem Politik Indonesia, selain status sosial ekonomi ada Variabel lain yang mempengaruhi partisipasi politik seperti

aspek gender, budaya politik, kepemimpinan informal, dan tingkat kekecewaan terhadap realitas yang ada, termasuk realitas pemerintahan dan politik.

Menurut Myron Weimer (2005) partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal:

1. Modernisasi.
2. Terjadi perubahan struktur kelas.
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern.
4. Adanya konflik antar pemimpin-pemimpin politik.
5. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial, dan budaya.

Milbrath menyebutkan terdapat empat faktor utama yang mendorong orang untuk partisipasi dalam kehidupan politik yaitu:

1. Adanya faktor perangsang politik, dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi seringnya mengikuti diskusi politik melalui media massa ataupun diskusi formal.
2. Faktor karakteristik pribadi seseorang, orang-orang yang berwatak sosial mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, ekonomi, politik, sosial budaya hamkamrata, biasanya mau terlibat dalam kegiatan politik.
3. Faktor karakter sosial seseorang, karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial mempengaruhi sikap, perspsi dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai keterbukaan kejujuran keadilan dan lain-lain tentu mau biasanya untuk turut serta berpartisipasi dalam bidang politik.
4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat orang-orang dengan senang hati mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Lingkungan politik yang

demokratis membuat orang merasa aman, bebas dan nyaman untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, berbeda halnya dengan lingkungan politik yang totaliter yang diwarnai dengan aktivitas-aktivitas kekerasan dan brutal justru akan dengan sendirinya membuat masyarakat menjauh dan enggan untuk berpartisipasi.

## 11. Perilaku Memilih

Secara Konseptual, Perilaku memilih atau *Voting Behavior* selanjutnya disebut *voting behavior* diartikan sebagai keikutsertaan warga masyarakat pada setiap pemilu yang merupakan tindakan membuat keputusan apakah memilih atau tidak memilih (Surbakti, 2010). Secara teoritis tentang perilaku memilih merupakan suatu studi yang bertujuan mengungkapkan beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan seseorang cenderung memilih suatu partai, kader partai, atau kandidat tertentu yang berkompetisi dalam pemilu atau Pilkada.

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Menurut Ramlan Surbakti perilaku memilih adalah: “Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not vote*) didalam suatu pemilihan umum (Pilkada secara langsung). Bila *voters* memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Jack C Plano memposisikan perilaku pemilih sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu.

Pendekatan ini akhir dari studi-studi yang dilakukan oleh seorang sosiolog, Paul F. Lazarsfeld, bersama rekan kerjanya Bernard Berelson dan Hazel

Gaudet dari *Columbia University Bureau of Applied Social Science*, sehingga kemudian mazhab ini lebih dikenal dengan Mazhab Columbia (*The Columbia School of Electoral Behavior*).

Roth (2009) lebih lanjut mengemukakan pendekatan ini sesungguhnya bertumpu pada beberapa aspek hubungan kemasyarakatan seseorang dengan lingkungan sosialnya. Karena itu setiap manusia selalu terikat di dalam berbagai lingkaran sosialnya, antara lain (a) status sosial ekonomi, semisal: tingkat pendidikan, jabatan dan jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas sosial; (b) agama, (c) etnik dan wilayah tempat tinggal semisal: kota, desa, daerah pesisir, ataupun pegunungan). Dengan begitu studi perilaku pemilih dari pendekatan sosiologis dapat dijelaskan dengan beberapa indikator berikut: (a) kesamaan status sosial (jabatan, pekerjaan, pendapatan dan pendidikan); (b) kesamaan gender (jenis kelamin); dan (c) usia, (d) kesamaan suku, agama, ras dan golongan, (e) tempat tinggalnya. Sedangkan pendekatan psikologis menurut Roth (2009) yang berusaha menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang singkat. Pendekatan ini berusaha menjelaskan melalui relasi tiga aspek psikologis, yakni identifikasi partai, orientasi kandidat dan orientasi isu-isu politik.

Dalam pendekatan yang sama, Ambardi, Mujani, & Liddle (2012) menjelaskan bahwa seorang warga berpartisipasi dalam pemilu atau pilpres bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya cukup informasi untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (*political efficacy*). Dengan demikian perilaku memilih seseorang dapat dipengaruhi oleh keterkaitan tiga aspek psikologis antara manusia dengan aspek-aspek Pemilu, seperti; (a) keterkaitan seseorang dengan partai politik, (b) orientasi seseorang terhadap isu-isu politik, (c) orientasi seseorang terhadap kandidat.



Berkaitan dengan perilaku pemilih, Firmansyah (2010) kemudian mencoba merumuskan beberapa tipe pemilih ke dalam empat bagian, yakni (a) pemilih rasional; (b) pemilih kritis; (c) pemilih tradisional; (d) pemilih skeptis. Pandangan yang tidak jauh berbeda diungkapkan juga oleh Pamungkas (2009: 74-75), bahwa secara teoritis terdapat tiga penjelasan dalam memahami perilaku politik pemilih, yakni: (a) penjelasan *party identification*, atau yang lebih dikenal dengan pendekatan psikologis; (b) penjelasan sosiologis; (c) penjelasan pilihan rasional. Selain tiga tipe ini menurut Pamungkas (2009: 75), masih ada penjelasan patron-klien, yaitu perilaku memilih yang sangat tergantung pada bagaimana perilaku elit panutannya (patron).

Perilaku pemilih dalam memilih dan memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada secara langsung. Pemberian suara atau voting secara umum dapat diartikan sebagai; sebuah proses di mana seorang anggota dalam suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan ikut menentukan konsensus diantara anggota kelompok seorang pejabat maupun keputusan yang diambil. Perilaku politik (*political behavior*) adalah suatu telaahan mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Situasi politik sangat luas cakupannya, antara lain: pengertian respons emosional berupa dukungan maupun apatis kepada pemerintah, respons terhadap perundang-undangan, dan lain-lain. Jadi, dengan demikian perilaku para pemilih atau pemberi suara dalam pemilihan umum. Tindakan dan perilaku politik individu sangat ditentukan oleh pola orientasi umum yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik (Beddy, 2013).

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat di antara lembaga-lembaga pemerintah dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, pada dasarnya merupakan perilaku politik. Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat

dicermati akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik (Surbakti, 2010)

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku memilih merupakan suatu tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam memberikan suara dalam suatu Pemilihan Umum/Pilkada secara langsung.

a. Pendekatan Perilaku Memilih

Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya Kuasa Rakyat, perilaku memilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama, masing-masing pendekatan Sosiologi, Psikologi, dan Pilihan Rasional.

1. Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial – usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya – memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan pilihan-pilihan politik Menurut Afan Gaffar indikator pendekatan sosiologis yaitu: pendidikan, jabatan/pekerjaan, jenis kelamin, usia.
2. Pendekatan psikologi, menurut pendekatan ini, para pemilih menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat karena produk dari sosialisasi yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah, sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali mereka memilih. Menurut Adman Nursal indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh pendekatan ini yaitu:
  - a) Ketokohan, dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan identitas atau ketokohan calon (atau tokoh dibelakangi calon) dan tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih.

- b) Identifikasi Partai yang dilihat dari kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya terhadap pilihan tertentu serta adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi.
3. Pendekatan pilihan rasional pilihan rasional menganggap seseorang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya yaitu kehidupan ekonomi oleh karena itu pendekatan ini juga disebut pendekatan ekonomis, melalui pendekatan ini pemilih diasumsikan mempertimbangkan segala pilihan yang ada, misalnya tiap-tiap parpol yang ada, tiap-tiap kandidat yang ada dan tiap-tiap kebijakan yang ada. Lalu, dilihat untung atau ruginya bagi individu. Pada akhirnya individu akan memilih yang memberi keuntungan paling besar dan kerugian paling kecil bagi dirinya. Menurut Anthony Downs dalam pendekatan pilihan rasional ini, dipaparkan dua orientasi yang menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan kandidat.

## **B. Kajian Penelitian Relevan**

1. Penelitian oleh Christine Diah Wahyuningsih dalam jurnal berjudul "Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi COVID-19 di Kota Semarang" (2021) mengeksplorasi partisipasi warga dalam Pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk memahami fenomena dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak kekhawatiran bahwa pandemi akan menurunkan partisipasi, tingkat partisipasi warga di Semarang tetap tinggi, mencapai 68,62%, lebih baik daripada Pilkada sebelumnya. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan partisipasi termasuk kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, pelaksanaan protokol kesehatan oleh penyelenggara, dan partisipasi pemilih pemula. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya

protokol kesehatan seperti pembatasan jumlah pemilih di TPS dan pengaturan waktu kedatangan guna mencegah penyebaran COVID-19. Persamaan antara penelitian Wahyuningsih dengan penelitian yang diusulkan oleh penulis terletak pada fokus peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada, khususnya faktor yang memengaruhi perilaku pemilih. Perbedaannya adalah pada variabel konteks pandemi yang spesifik, yang memengaruhi pelaksanaan Pilkada secara keseluruhan.

2. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Elly Hasan Sadeli, Razif Algiffary Sukma, Wildan Nurul Fajar, dan Efi Miftah Faridli pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya yang telah memenuhi syarat dalam menggunakan hak pilih. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rumus slovin dengan nilai kritis 10% dan sampel yang digunakan adalah masyarakat desa Cipatujah kabupaten Tasikmalaya yang telah memenuhi syarat dalam menggunakan hak pilih berjumlah 98 jiwa. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat desa Cipatujah kabupaten Tasikmalaya dalam pemilihan kepala daerah 2020. Pengaruh variabel kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat desa Cipatujah kabupaten Tasikmalaya dalam pemilihan kepala daerah 2020 sebesar 0,073 yang dapat ditafsirkan bahwa variabel independen (X) memiliki kontribusi pengaruh sebesar 7,3% terhadap variabel dependen (Y) dan 92,7%.
3. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Hasanul Bulqiyah, Sholeh Muadi, dan George Towar Ikbil Tawakkal pada tahun 2019 dengan judul Pemilihan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Marjinal Studi Kasus di Pulau Bawean. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek

penelitian, misalnya sebuah perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Penelitian dilakukan informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* dan *random*. Penentuan secara *purposive* ditujukan kepada perwakilan KPU Kabupaten Gresik. Sedangkan *random* digunakan untuk menentukan informan yang berlatar belakang tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Randomisasi informan masyarakat umum didasarkan tiga kriteria, yakni masyarakat berpenghasilan tinggi (>7,5 Juta), masyarakat berpenghasilan menengah (5 Juta-7,5 Juta), dan masyarakat berpenghasilan rendah (0-5 Juta). Setelah data semua dikumpulkan maka langkah selanjutnya analisis data dengan menggunakan teknik analisis model interaksi yaitu pengumpulan data, kondensasi data, *display data*, kesimpulan/ verifikasi. Hasil pengumpulan data ini kemudian dilakukan kondensasi data untuk memfokuskan data-data yang digunakan setelah itu data akan di display sesuai dengan pengelompokan tema. Perbedaan penelitian Hasanul Bulqiyah, Sholeh Muadi, dan George Towar Ikbil Tawakkal dengan penulis adalah terletak pada fokus penelitian terhadap Pilkades. Sedangkan persamaan penelitian oleh Hasanul Bulqiyah, Sholeh Muadi, dan George Towar Ikbil Tawakkal dengan penelitian penulis adalah terletak pada keduanya menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai metode utama pengumpulan data.

### C. Kerangka Pikir Penelitian

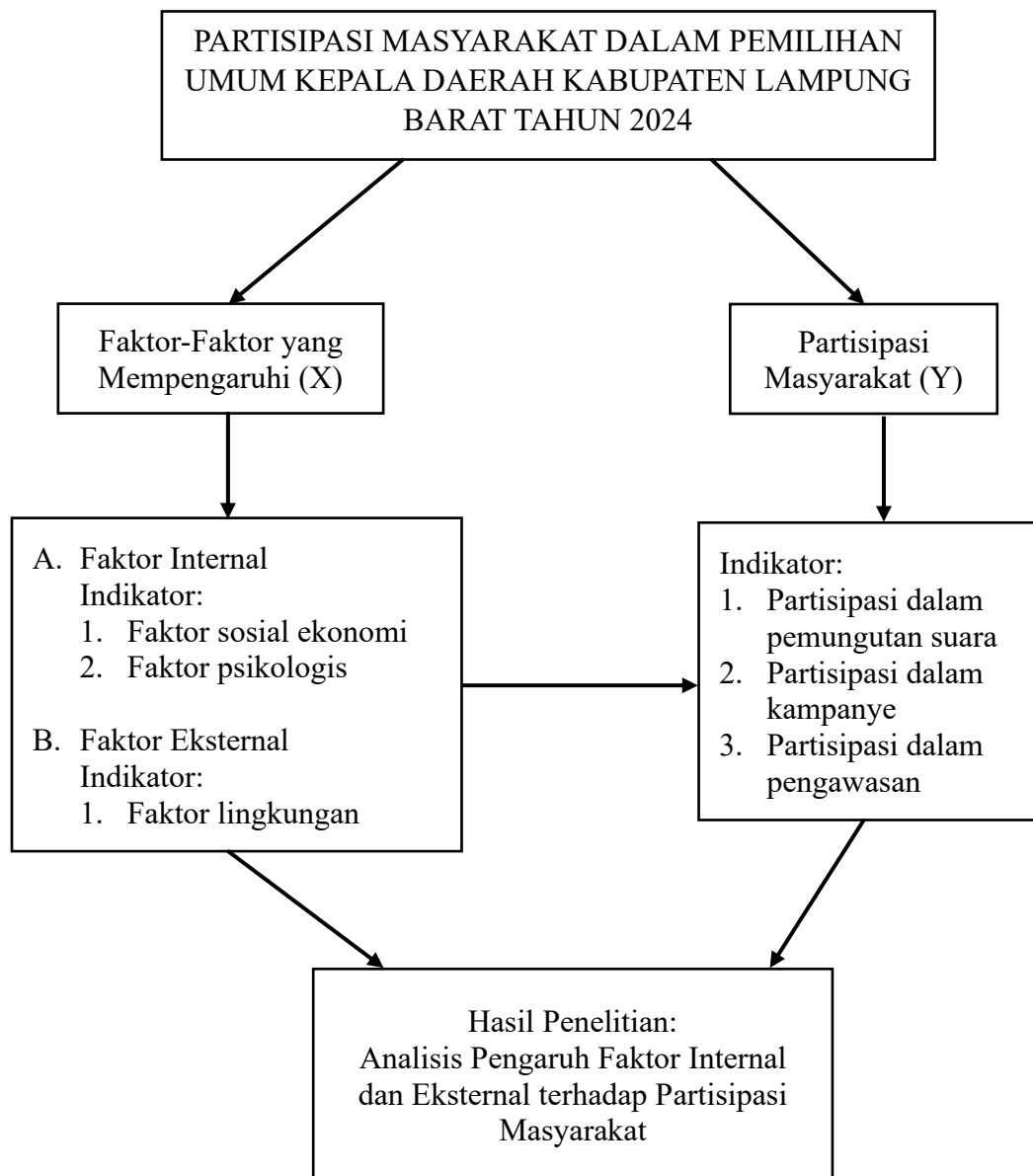
Kerangka pemikiran merupakan kerangka konseptual yang memaparkan dimensi-dimensi utama dari penelitian, faktor-faktor kunci, variabel-variabel yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk nara si atau grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam penyusunan metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian ini kerangka konseptual Faktor internal dan eksternal yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

Partisipasi masyarakat sebagai pemilih sangat penting keikutsertaannya dalam menyukseskan penyelenggaraan pilkada sebagai wujud negara yang

demokratis. Dalam penelitian ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Mekarsari dalam Pilkada, yakni:

1. Faktor Internal
  - a. Faktor Sosial Ekonomi
    - 1) Tingkat Pendidikan
    - 2) Status Pekerjaan
  - b. Faktor Psikologis
    - 1) Kesadaran Politik
    - 2) Sikap dan Kepercayaan Politik
2. Faktor Eksternal
  - a. Faktor Lingkungan
    - 1) Pengaruh Keluarga
    - 2) Pengaruh Lingkungan Sosial
    - 3) Akses Terhadap Informasi
3. Partisipasi dalam Pemungutan Suara
  - a. Kehadiran di TPS
  - b. Kesadaran Mencoblos
4. Partisipasi dalam Kampanye
  - a. Kehadiran dalam Kampanye
  - b. Keterlibatan dalam Tim Sukses
5. Partisipasi dalam Pengawasan
  - a. Pengawasan Pemilu
  - b. Pelaporan Pelanggaran

Dari beberapa faktor-faktor tersebut peneliti berusaha mengukur faktor mana saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Dari uraian di atas mengenai kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

#### **D. Hipotesis**

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1.  $H_0$ : tidak ada Pengaruh Variabel Penelitian (X) terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat (Y) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Desa Mekarsari Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.
2.  $H_1$  : ada Pengaruh Variabel Penelitian (X) terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat (Y) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Desa Mekarsari Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.



### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis serta akurat. Dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan konsep-konsep dari satu variabel dengan variabel lainnya dengan angka.

Dalam penelitian ini, terdapat variabel penelitian yakni faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagai variabel X dan partisipasi masyarakat sebagai variabel Y. Dengan menggunakan skala *likert*, indikator-indikator variabel tersebut akan ditransformasikan menjadi item-item pertanyaan yang dimasukkan dalam kuesioner. Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis menggunakan program statistik yaitu IBM SPSS 23 dan untuk merapikan data menggunakan bantuan *Microsoft Excel*.

Penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Jadi, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian deskriptif ini peneliti ingin memaparkan data-data dan menganalisis secara objektif serta menunjukkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Desa Mekarsari Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat.

## B. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2008) Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok obyek yang lengkap dan jelas. Populasi merupakan keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada Tahun 2024 di Desa Mekarsari Kecamatan Pagar Dewa yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan dengan jumlah 1.012 pemilih.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi narasumber data yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012) sampel adalah jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Usman dan Purnomo (2008), menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling (Usman dan Purnomo, 2008). Adapun yang menjadi sampel adalah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Mekarsari Kecamatan Pagar Dewa. Sampel yang akan digunakan ditentukan menggunakan Rumus Slovin yang menghitung banyaknya sampel minimum suatu populasi (Sugiyono, 2012).

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*) yang diinginkan, yaitu sebesar 10% dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{1012}{1 + 1012 \cdot (0,10)^2} \\
 n &= \frac{1012}{1 + 10,12} \\
 n &= \frac{1012}{11,12} \\
 n &= 91,00
 \end{aligned}$$

Hasil yang diperoleh melalui rumus slovin adalah 91,00 yang kemudian dibulatkan menjadi 91 sehingga sampel yang peneliti butuhkan untuk melakukan penelitian faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat adalah sebanyak 91 orang masyarakat yang berada di Desa Mekarsari Kecamatan Pagar Dewa .

### C. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2010) variabel penelitian adalah karakteristik, atribut, atau nilai yang ada pada individu, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi yang ditentukan oleh peneliti untuk diselidiki dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, peneliti membedakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (diberi simbol x) yang berperan sebagai faktor yang memengaruhi, dan variabel terikat (diberi simbol y) yang merupakan variabel yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, yaitu:

- a. Variabel bebas (*Independent variabel*) Variabel bebas (X) dalam penelitian ini ialah Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.
- b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*) Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat.

### D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

#### 1. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah penjelasan suatu konsep yang dijadikan pedoman dalam penelitian, dengan tujuan untuk mempermudah penelitian.

Definisi konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut: Partisipasi merupakan keikutsertaan secara langsung maupun tidak langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi yang dimaksud dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat menurut Syamsi (2014) adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi juga merupakan hak demokrasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kebijakan pemerintah yang menyejahterakan. Partisipasi Politik merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara secara aktif dalam kehidupan politik untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan segala keputusan kebijakan pemerintah yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

b. Pilkada

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan negara yang demokratis yang dilakukan secara demokratis berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Perilaku memilih merupakan suatu tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam memberikan suara dalam suatu Pemilihan Umum/Pilkada secara langsung.

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

### a. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi (X)

#### a) Faktor Internal

Faktor internal mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan seperti faktor sosial ekonomi dan faktor psikologis. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, kesadaran politik, sikap kepercayaan terhadap politik dan status pekerjaan.

#### b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak yang menjadi *stakeholder* dengan partisipan yang dapat mempengaruhi partisipasi karena partisipan akan dengan sukarela terlibat dalam suatu kegiatan yang diinstruksikan *stakeholder*. Faktor eksternalnya seperti pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan sosial, dan akses terhadap informasi.

### b. Partisipasi Masyarakat (Y)

#### a) Partisipasi dalam pemungutan suara

Sebagai warga negara yang baik pentingnya memberikan hak suara untuk menentukan nasib daerah yang akan dipimpin oleh pemimpin yang terpilih kedepannya, Proses memberikan suara dari seseorang pemilih kepada salah satu calon kandidat, seorang pemilih harus melalui beberapa proses mulai dari pendataan hingga masuk dalam DPT kemudian dapat memberikan suara.

b) Partisipasi dalam kampanye

Tukar pikiran dalam pembahasan masalah atau peristiwa politik yang terjadi yang dilakukan baik secara formal maupun informal, baik diskusi yang dilakukan di warkop yang biasanya dilakukan oleh kaum *milenial*, di televisi, disekolah, dirumah, dan dimana saja yang membentuk diskusi-diskusi politik yang diadakan sehingga bisa mengetahui perkembangan politik sehingga, masyarakat bisa mengetahui perkembangan politik saat ini.

c) Partisipasi dalam pengawasan

Keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif, kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh calon kandidat melalui tim suksesnya yang menggelar acara ini sehingga masyarakat bisa hadir untuk menyaksikan calon kandidat menyampaikan visi dan misinya secara langsung didepan masyarakat. Ini sebuah daya tarik bagi calon kandidat untuk memperoleh suara dari masyarakat.

Dengan Tingkat keterlaksanaan yang diukur yaitu:

- 1) Ya, bila indikator dari partisipasi masyarakat tersebut memiliki pengaruh pada populasi masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Tidak, bila indikator dari partisipasi masyarakat tersebut belum berpengaruh pada masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 1. Operasional Variabel dalam Indikator

| No. | Variabel X                                                                                                                     | No. | Variabel Y                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Faktor Sosial Ekonomi</b><br>Indikator:<br>a. Tingkat Pendidikan<br>b. Status Pekerjaan                                     | 1.  | <b>Partisipasi Dalam Pemungutan Suara</b><br>Indikator:<br>a. Kehadiran di TPS<br>b. Kesadaran Mencoblos           |
| 2.  | <b>Faktor Psikologis</b><br>Indikator:<br>a. Kesadaran Politik<br>b. Sikap dan Kepercayaan Politik                             | 2.  | <b>Partisipasi Dalam Kampanye</b><br>Indikator:<br>a. Kehadiran dalam Kampanye<br>b. Keterlibatan dalam Tim Sukses |
| 3.  | <b>Faktor Lingkungan</b><br>Indikator:<br>a. Pengaruh Keluarga<br>b. Pengaruh Lingkungan Sosial<br>c. Akses Terhadap Informasi | 3.  | <b>Partisipasi Dalam Pengawasan</b><br>Indikator:<br>a. Pengawasan Pemilu<br>b. Pelaporan Pelanggaran              |

## E. Teknik Pengambilan Data

Pada hakikatnya data merupakan sebuah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka (Arikunto, 2019). Teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam segala informasi berupa fakta dan angka atau hal-hal sebagian atau ukuran keseluruhan mengenai suatu variabel atau seluruh populasi secara lengkap sehingga harapannya dapat menjadi pendukung keberhasilan dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Teknik Pokok

#### a. Angket

Menurut Sugiyono (2007) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jadi, kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dan dibagikan kepada responden sebelum penelitian dilakukan.

Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari responden. Jenis angket yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah angket tertutup yang diisi oleh responden sesuai dengan kolom yang telah disediakan peneliti. Untuk mempermudah peneliti mengumpulkan data. Sasaran angket ini yaitu masyarakat Desa Mekarsari.

Skor bobot yang berbeda-beda pada setiap item yang memiliki tiga alternatif jawaban yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk alternatif jawaban berpengaruh diberi nilai skor 3.
- b. Untuk alternatif jawaban cukup berpengaruh diberi nilai skor 2.
- c. Untuk alternatif jawaban tidak berpengaruh diberi nilai skor 1.

## **2. Teknik Penunjang**

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, wawancara ialah proses pengajuan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber untuk mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2017).

Wawancara ini digunakan sebagai penunjang dalam penelitian untuk mengumpulkan data tambahan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tanpa disiapkan sebelumnya (wawancara bebas). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan masyarakat yang terdaftar pemilih tetap di Desa Mekarsari Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat untuk mendapatkan data tambahan berupa informasi terkait pengaruh pembelajaran pendidikan kewarnegaraan dalam membentuk partisipasi masyarakat terhadap Pilkada 2024.



## F. Uji Validitas dan Reliabilitas

### 1. Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat-tingkat *valid* atau kesahihan suatu instrumen. Semakin tinggi validitas dari sebuah instrumen maka instrumen tersebut *valid*, namun sebaliknya semakin rendah validitas dari sebuah instrumen maka nilai dari sebuah instrumen kurang *valid* atau memiliki validitas rendah.

Berdasarkan uraian tersebut uji validitas dapat diartikan sebagai kontrol langsung terhadap teori- teori yang telah melahirkan indikator variabel yang disesuaikan dengan maksud dan isi butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket dan konsultasi dengan Pembimbing 1 dan Pembimbing II. Kemudian hasil uji coba angket menunjukkan bahwa variabel Faktor-faktor yang mempengaruhi (X) dan variabel Partisipasi masyarakat (Y) dinyatakan *valid*. Uji validitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Cara mengukur variabel konstruk yaitu mencari korelasi antara masing- masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi *Pearson product moment*, sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{N\sum x^2 - (\sum x)^2}[\sum y^2 - (\sum y)^2]} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- $r_{xy}$  = Koefisien korelasi pearson validitas
- $x$  = Skor tanggapan responden atas setiap pertanyaan
- $y$  = Skor tanggapan responden atas seluruh pertanyaan
- $n$  = Banyaknya jumlah/subjek responden

### 2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2021) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas instrumen ialah syarat

pengujian validitas instrumen, maka dari itu instrumen yang *valid* umumnya pasti reliabel namun pengujian reliabilitas instrumen tetap perlu dilakukan. Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Kriteria penilaian uji reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Koefisien Reliabilitas

| No. | Interval   | Kriteria      |
|-----|------------|---------------|
| 1.  | >0,20      | Sangat rendah |
| 2.  | 0,20-0,399 | Rendah        |
| 3.  | 0,40-0,599 | Cukup         |
| 4.  | 0,60-0,799 | Tinggi        |
| 5.  | 0,80-1,00  | Sangat tinggi |

Sumber: Wibowo, 2015

Selain itu, nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai  $r$  tabel menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS secara *default* menggunakan nilai ini) dan  $dfN - 2$ ,  $N$  adalah banyaknya sampel dan  $k$  adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu:

- Jika  $r_{hitung} (r_{alpha}) > r_{alpha} df$  maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut reliabel.
- Jika  $r_{hitung} (r_{alpha}) < r_{alpha} df$  maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut tidak reliabel.

Setelah dilakukan uji coba terhadap 13 responden, berdasarkan hasil perhitungan dua angket diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk angket Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,944 ( $0,944 > 0,6$ ) dari 18 item pernyataan yang *valid* dan dapat dikategorikan memiliki kriteria yang tinggi. Kemudian untuk angket Partisipasi masyarakat dalam Pilkada diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,921 ( $0,921 > 0,6$ ) dari 13 item pernyataan yang *valid* dan dapat

dikategorikan memiliki kriteria yang tinggi. Dengan demikian 18 item pernyataan dari variabel X dan 13 item pernyataan dari variabel Y dapat dinyatakan *valid* dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut telah baik bahkan dalam angket peneliti kedua variabel dinyatakan tinggi atau secara singkat dinyatakan reliabel sebagai instrumen dalam penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dimana informasi yang telah diperoleh ditafsirkan dengan melewati proses yang cukup panjang untuk mendapatkan hasilnya. Menurut Sugiyono (2012), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga data dapat dengan mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data berusaha untuk mengurangi kompleksitas dalam data sehingga mudah dibaca dan dianalisis. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kuantitatif, yaitu dengan mengubah kata menjadi frasa dan angka secara metodis. Setelah pengumpulan semua data yang diperlukan, analisis dalam penelitian ini diselesaikan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi data dan kemudian memprosesnya.

Menentukan klasifikasi skor dengan menggunakan rumus interval, yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

I               = Intereval  
 NT             = Nilai Tertinggi  
 NR             = Nilai Terendah  
 K               = Kategori

Untuk Mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{f}{N} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

% = Besarnya Persentase

$f$  = Jumlah alternatif seluruh item

$N$  = Jumlah perkalian antar item dan responden

Data yang sudah dipersentasekan lalu dideskripsikan, hasil persentase dapat digolongkan dengan kriteria sebagai berikut:

Persentase Jawaban

1. 76% - 100% = Kurang

2. 56% - 75% = Cukup

3. 40% - 55% = Berpengaruh

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Mekarsari, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024", maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Mekarsari pada Pilkada Tahun 2024 tergolong cukup tinggi meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi, melainkan tetap menyalurkan hak pilihnya sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab warga negara. Partisipasi yang tinggi tersebut dipengaruhi oleh adanya dorongan norma sosial dan budaya politik lokal yang menempatkan kehadiran di TPS sebagai kewajiban moral, pengaruh keluarga dan tokoh masyarakat yang berperan aktif mengajak warga, serta pemahaman masyarakat bahwa kehadiran mereka menentukan sah tidaknya pasangan calon tunggal melalui mekanisme suara sah dan tidak sah. Dengan kata lain, partisipasi tetap tinggi karena masyarakat menyadari pentingnya keterlibatan mereka untuk memberikan legitimasi pada hasil pemilihan. Dari berbagai faktor yang diteliti, kesadaran politik muncul sebagai faktor paling dominan dengan pengaruh sebesar 72,3% terhadap partisipasi politik, karena mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, dan kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mendorong mereka untuk tetap berpartisipasi aktif meskipun pilihan kandidat terbatas, sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi di tingkat lokal.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Masyarakat

Masyarakat Desa Mekarsari diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran politik dan aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu, tidak hanya sebatas memberikan suara, tetapi juga terlibat dalam kampanye yang sehat, serta melakukan pengawasan terhadap proses demokrasi agar berjalan jujur dan adil. Partisipasi aktif ini penting untuk menjaga kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

### 2. Bagi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu)

Diharapkan dapat memperkuat program sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Informasi mengenai pentingnya pemilu dan prosesnya harus disampaikan secara masif dan menggunakan pendekatan budaya lokal agar lebih mudah diterima. Pemerintah juga perlu memberikan akses informasi politik yang mudah dijangkau dan relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan metode yang lebih kompleks, seperti regresi berganda atau analisis kualitatif mendalam, serta memperluas cakupan wilayah penelitian. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain seperti peran media sosial, tokoh agama, dan pengaruh isu-isu lokal terhadap partisipasi pemilih agar hasil penelitian lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2014. Pilkada dan Proses Demokrasi di Tingkat Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(1), 55-70.
- Agustino, Leo. 2014. Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Bandung: Alfabet
- Akbar, A., Husaini, H., & Purnomo, P. 2008. *Statistika untuk Penelitian Sosial*.
- Almond, G. A., & Verba, S. 1963. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Ambardi, K., Mujani, S., & Liddle, R. W. 2012. Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru. Jakarta: Mizan Publika.
- Arniti, K. 2020. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(1), 45-60.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. 2010. Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society. Institute of Southeast Asian Studies.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. 2010. Indonesia's 2009 Elections: A New Era of Democracy? In *The Indonesian Elections of 2009: A New Era of Democracy?* (pp. 1-25). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Barat. 2023. Statistik Daerah Kabupaten Lampung Barat. Diakses dari [bps.go.id](https://bps.go.id).
- Berelson, B. R., Lazarsfeld, P. F., & Gaudet, H. 1944. *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*. New York: Duell, Sloan and Pearce.
- Budiarjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bulqiyah, H., Muadi, S., & Tawakkal, G. T. I. 2019. *Pemilihan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus di Pulau Bawean*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 1–15.
- Cholisin. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Conyers, D. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Damsar. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Diah P N, B. Pitoewas., D S Putri. 2024. Pengaruh Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi Peserta Didik.
- Downs, A. 1957. *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper and Row.
- Febriadi, A. 2018. Implementasi Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 123-145.
- Firmansyah. 2010. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gaffar, A. 1992. *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ginting, R. 2018. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Proses dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 101-115.
- Haris, S. 2014. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Proses Demokratisasi*. Jakarta: LIPI Press.
- Haryanto, B. 2019. Geografi dan Infrastruktur dalam Partisipasi Pemilih di Lampung Barat. *Jurnal Geografi dan Pembangunan*, 5(3), 78-85.
- Hendrik. 2010. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan di Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(2), 145-162.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khamisi, A. 2013. *Pemikiran Politik: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Liando, Daud M. 2016. Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Volume 3 Nomor 2
- Masa, R. Y. 2021. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 123-136.
- Milbrath, L. W. 1977. *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics*. Chicago: Rand McNally College Publishing Company.
- Muhaling, A. 2014. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(3), 234-248.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. 2012. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan Publika.



- Narayan, D. 2002. *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. Washington, D.C.: The World Bank, hal. 15.
- Nurhasim, M. 2014. Politik Tradisional di Indonesia: Studi Kasus di Lampung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(1), 45-60.
- Nursal, A. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pamungkas, S. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Lab. Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM.
- Plano, J. C. 1989. *Political Science Dictionary*. California: ABC-CLIO.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahmatunnisa, A. 2017. Pilkada sebagai Arena Demokrasi Perwakilan. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 14(2), 89-102.
- Randi, A., et al. 2021. Dinamika Partisipasi Pemilih dalam Pilkada di Indonesia: Analisis Tren dan Faktor Pendorong. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 9(3), 123-140.
- Roth, D. 2009. *Soziologie des Wahlverhaltens: Eine Einführung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Rush, M., & Althoff, P. 1986. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadeli, E. H., Sukma, R. A., Fajar, W. N., & Faridli, E. M. 2022. *Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020*. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(2), 112–126.
- Salim, A. 2014. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 6(1), 45-60.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suharno. 2020. *Teori dan Praktik Partisipasi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, S. 2007. Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmu Politik*, 5(2), 78-92.
- Suryadi, B. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Suryadi, E., & Karim, M. 2018. Sosialisasi Pemilih: Strategi dan Implementasi oleh KPU. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 12(2), 115-130.
- Sutrisno, Cucu. 2017. Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2 No 2

- Usman, H., & Purnomo, P. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 45.
- Wahyuningsih, C. D. 2021. *Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi COVID-19 di Kota Semarang*. *Jurnal Politik Lokal dan Pemerintahan*, 3(1), 58–7
- Wiwik, S. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 123-145.
- Yusdianto, A., & Sa'ban, M. 2019. Pilkada dan Akuntabilitas Kepala Daerah: Harapan Masyarakat dan Realitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1), 25-40.